

# Analisis Opini Tidak Memberikan Pendapat BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti

## *(The Opinion Analysis Does Not Provide the BPK RI's Opinion on the Financial Statements of Meranti Islands Regency)*

Hani Putri Monalika

Universitas Dian Nusantara, DKI Jakarta, Indonesia

[Hani.putri.monalika@dosen.undira.ac.id](mailto:Hani.putri.monalika@dosen.undira.ac.id)



### Riwayat Artikel

Diterima pada 14 Oktober 2024

Revisi 1 pada 15 Oktober 2024

Revisi 2 pada 20 November 2024

Revisi 3 pada 25 November 2024

Revisi 4 pada 3 Desember 2024

Disetujui pada 25 Desember 2024

### Abstract

**Purpose:** This study aims to examine and analyze the Follow-up on the Audit Report of the Indonesian Supreme Audit Agency (BPK RI) on the Local Government Financial Report (LKPD) of the Kepulauan Meranti Regency, as well as to assess the level of transparency and accountability in financial performance reporting.

**Research methodology:** This research uses a descriptive qualitative approach, employing document study or content analysis, and in-depth interviews with stakeholders such as auditors.

**Results:** The audit opinion was a "disclaimer of opinion" due to several critical issues: the financial report lacked clarity and did not meet presentation standards, supporting documentation for financial transactions was insufficient, and the accounting system was inadequate, causing inconsistencies. Weak internal controls and limited resources, including insufficient training and experience in financial management, further contributed to the problem. The study recommends improvements in transparency, accuracy, and human resource capacity to achieve better audit opinions in the future.

**Conclusions:** The 2023 BPK report highlights suboptimal management of Fixed Assets, affecting the quality of the financial statements. Follow-up actions have been delayed due to factors such as human resources, coordination, and weak internal control. Efforts should focus on improving asset management and coordination with BPK.

**Limitations:** The limitations encountered during the research process include the difficulty in collecting confidential data and the challenges of conducting interviews with relevant decision-makers.

**Contribution:** This study focuses more on qualitative research methods, which differentiates it from previous studies that have focused more on quantitative methods and statistical analysis.

**Keywords:** *Audit, BPK RI Audit Report, Financial Reporting, Follow-up, Qualitative*

**How to Cite:** Monalika, H, P. (2024). Analisis Opini Tidak Memberikan Pendapat BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis (Rambis)*, 4(2), 265-273.

## 1. Pendahuluan

Opini BPK RI sangat penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan suatu daerah (Fitriana, Widarno, & Harimurti, 2019). Sebuah opini TMP menunjukkan adanya ketidakpastian yang signifikan tentang laporan tersebut (Sianturi & Rinendy, 2023). Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai salah satu

daerah otonom, telah menerima opini TMP dari BPK, sehingga penting untuk menganalisis penyebab dan dampaknya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peranan kritik dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah (Sekenil & Heluka, 2021). Opini yang diberikan berdampak pada kredibilitas laporan keuangan daerah (Anisman, 2021). Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berpotensi kaya akan sumber daya alam, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangannya, yang dapat mempengaruhi opini BPK (Keuangan, 2019).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Keuangan, 2019). Oleh karena itu, BPK menyusun Renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehubungan dengan ini, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu: 1) pemeriksaan keuangan; 2) pemeriksaan kinerja; dan 3) pemeriksaan atas tujuan tertentu (Zakariya, 2020). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh dari informasi mengenai hal-hal pokok pemeriksaan dan hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan (Indonesia, 2017). Menurut (Rahmawati, Rikumahu, & Dillak, 2017) suatu laporan audit harus memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu lembaga legislatif, pemerintah, media publik maupun akademisi (Lubna, Arifin, & Nurmala, 2024). Berdasarkan penjelasan tersebut suatu laporan audit harus disusun sebaik mungkin sesuai dengan standar pelaporan (Rokib, Wisandani, & Murhasanah, 2021).

Penelitian ini berfokus pada analisis opini yang tidak memberikan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti. Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan indikator penting dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketika BPK tidak memberikan opini atau memberikan opini yang tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*), hal ini mengindikasikan adanya kelemahan atau ketidaksesuaian signifikan dalam penyajian laporan keuangan yang dapat memengaruhi pemahaman publik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Safrizal, Azlina, & Wahab, 2023). Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Meranti, ketidakberitaannya opini dari BPK perlu dianalisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil audit tersebut.

Latar belakang penelitian ini juga berangkat dari kebutuhan untuk mengevaluasi seberapa besar dampak dari ketidakadaan opini tersebut terhadap pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah (Fahrani et al., 2024). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penyebab utama ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta dampaknya terhadap kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat dan lembaga pengawas lainnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar proses penyusunan laporan keuangan dapat lebih transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia (Sary, Rahman, Prayuda, & Sundari, 2021). Kabupaten ini terdiri dari beberapa pulau yang berada di sekitar Selat Melaka, dengan ibu kotanya berada di Selat Panjang (Ratnasari, Yuliantoro, & Fikri, 2021). Kepulauan Meranti memiliki luas sekitar 5.532 km<sup>2</sup> dan terdiri dari pulau-pulau besar seperti Pulau Meranti, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebingtinggi, serta pulau-pulau kecil lainnya (Muzaki, Yuliani, & Farida, 2017). Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor perikanan dan kelapa sawit (Bakce, Syahza, & Asmit, 2019). Keindahan alam yang dimiliki daerah ini menjadikannya sebagai destinasi wisata potensial, meskipun infrastruktur dan fasilitas pendukungnya masih terus berkembang (Nandaska, 2020).

Sebagian besar penduduk di Kepulauan Meranti bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan pekerja di sektor Perkebunan (Sary et al., 2021). Potensi ekonomi utama daerah ini terletak pada sektor

kelapa sawit dan perikanan, yang menjadi sumber utama pendapatan Masyarakat (Bakce et al., 2019). Selain itu, Kepulauan Meranti juga terkenal dengan kekayaan hasil hutan dan potensi budidaya laut seperti rumput laut dan ikan, yang semakin meningkatkan daya tarik daerah ini dalam sektor ekonomi local (Rasudin, 2022). Meskipun demikian, wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan public (Al Falah, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, baik itu transportasi, listrik, dan akses telekomunikasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat (Pertiwi, Sujianto, & Mashur, 2024). Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan aksesibilitas dan distribusi barang, mengingat lokasi geografisnya yang terpisah oleh lautan (Alifia, 2024). Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah (Syahza & Suarman, 2018). Dengan adanya upaya pengembangan ini, diharapkan Kepulauan Meranti dapat tumbuh menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri, serta mampu menghadapi tantangan globalisasi dengan lebih baik.

## 2. Tinjauan pustaka

Opini BPK dibagi menjadi beberapa kategori yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Setiap kategori opini menggambarkan tingkat keandalan laporan keuangan. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Meranti, opini TMP menjadi perhatian khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Fenomena berangkat dari fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial atas perilaku dan kejadian terkait dengan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dipilih peneliti dengan alasan karena dalam penelitian ini tidak berupaya mencari hubungan sebab akibat (*casuality*), melainkan hanya memberikan gambaran atas fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengamati suatu kondisi secara mendalam dan bertujuan untuk menemukan makna di balik sesuatu yang terjadi secara alamiah (Paemba, Todingbua, & Tandi, 2024). penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Anasta & Ambarwati, 2023). Kriyantono (2020) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada penggalian kedalaman data daripada keluasan data. Denzin & Lincoln dalam Anggito and Setiawan (2018) memberikan pemahaman bahwa penelitian kualitatif menafsirkan fenomena menggunakan latar belakang yang alamiah. Sedangkan Erickson dalam Anggito and Setiawan (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari gambaran naratif dari kegiatan dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami (Hardani, Sukmana, & Fardani, 2020). Sudaryono yang dikutip (Fahriyani, Sitasari, & Safitri, 2020) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang fokus menganalisis kehidupan sosial atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah. Di sisi lain (Yusanto, 2020) menjelaskan tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam mengenai suatu gejala, fakta atau realita.

Penelitian ini akan difokuskan pada berbagai konsep dan teori yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah, serta mekanisme audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pertama, penting untuk mengkaji teori-teori dasar tentang akuntansi pemerintahan dan standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa referensi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan standar akuntansi pemerintahan, dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan. Pemahaman ini akan membantu peneliti dalam menganalisis apakah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mengikuti prosedur yang tepat dalam menyusun laporan keuangan.

Selanjutnya, tinjauan pustaka juga perlu mencakup pembahasan mengenai proses audit yang dilakukan oleh BPK RI, terutama mengenai pemberian opini atas laporan keuangan daerah. Tinjauan ini akan mencakup berbagai jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK, seperti opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat (di S+claimer), dan tidak wajar. Beberapa penelitian sebelumnya dapat dijadikan referensi untuk memahami faktor-faktor penyebab ketidakmampuan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, serta dampaknya terhadap pemberian opini BPK. Melalui kajian ini, peneliti dapat memahami lebih dalam bagaimana prosedur audit BPK berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Juga perlu membahas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, terutama di daerah dengan sumber daya manusia dan infrastruktur yang terbatas. Beberapa literatur yang relevan akan membahas masalah-masalah yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti ketidaktertiban administrasi, rendahnya kapasitas SDM di bidang akuntansi, serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat membantu peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memberikan landasan teori yang kuat untuk menganalisis hasil penelitian yang lebih mendalam.

### **3. Metode penelitian**

Bogdan dalam Hardani et al. (2020) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dari laporan hasil pemeriksaan BPK serta wawancara dengan pejabat daerah dan masyarakat sipil untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai situasi keuangan daerah (Juliyanti, 2023). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan fenomena tidak diberikannya opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendasari permasalahan ini secara lebih komprehensif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan wawancara dengan pejabat terkait di pemerintah daerah, auditor BPK, serta pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai proses penyusunan dan audit laporan keuangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan kontekstual mengenai kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap opini BPK.

Selain itu, analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara induktif, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan masalah-masalah yang muncul dari data yang terkumpul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang lebih holistik mengenai penyebab ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang memadai. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika internal yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah serta bagaimana kebijakan dan praktik di tingkat pemerintahan daerah dapat diperbaiki untuk memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan.

### **4. Hasil dan pembahasan**

Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat (Putra & Sentosa, 2021). Tujuan utama dari pemantauan tindak lanjut adalah untuk meningkatkan efektifitas laporan audit dan meyakinkan auditor bahwa *auditee* telah memperbaiki kelemahan yang telah diidentifikasi (BPK, 2019). Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 yang selanjutnya disempurnakan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

Pada tahun 2023 progres TLHP di Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilaksanakan sesuai progress dan SOP. Progres TLHP ini merupakan hasil akumulasi selama 12 bulan kerja dengan adanya kondisi ini menunjukkan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus menuntaskan progress yang belum terlaksanakan supaya mencapai target minimal TLHP yang ditetapkan BPK yaitu dengan standar pencapaian pada angka 75%. Untuk progres TLHP pada tahun 2023 menunjukkan hanya tinggal beberapa item temuan yang sifatnya administrasi belum diselesaikan. Sedangkan untuk temuan Aset Tetap yang nilainya besar sudah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dari BPK. Perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak BPKD, Inspektorat Daerah maupun para SKPD terkait menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2023 memperoleh opini WTP. Hal ini juga menunjukkan bahwa progres TLHP Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan tahun 2023 telah dapat terlaksanakan dengan baik.

#### ***4.1 Penyebab Opini TMP***

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan BPK memberikan opini TMP terhadap Kabupaten Kepulauan Meranti. Di antaranya adalah kurangnya dokumentasi yang memadai, masalah dalam akuntansi persediaan, serta ketidakpahaman aparat mengenai regulasi dan standar akuntansi pemerintah.

#### ***4.2 Dampak Terhadap Pengelolaan Keuangan***

Opini TMP membawa konsekuensi serius bagi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan dari masyarakat dan investor, serta dapat mempengaruhi akses daerah terhadap dana bantuan dan pinjaman.

#### ***4.3 Konsekuensi pada Akuntabilitas***

Akuntabilitas pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh opini keuangan. Adanya opini TMP menunjukkan adanya masalah dalam transparansi dan akuntabilitas, yang dapat memicu ketidakpuasan publik dan potensi konflik dalam pengelolaan sumber daya daerah.

#### ***4.4 Peran Masyarakat Sipil***

Masyarakat sipil berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Opini TMP mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Hal ini dapat membantu memperbaiki pengelolaan keuangan di masa mendatang.

#### ***4.5 Strategi Perbaikan***

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi, Kabupaten Kepulauan Meranti perlu mengambil langkah-langkah strategis. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam bidang akuntansi dan keuangan, serta peningkatan sistem pengendalian internal menjadi prioritas.

#### ***4.6 Koordinasi Antar-Lembaga***

Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan BPK agar masalah yang menyebabkan TMP dapat ditangani secara efektif. Sinergi antara berbagai lembaga pemerintahan adalah kunci dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

#### ***4.7 Kebijakan dan Regulasi***

Perbaikan dalam kebijakan dan regulasi terkait manajemen keuangan daerah juga harus dilakukan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua perangkat hukum dan regulasi diimplementasikan secara konsisten.

#### ***4.8 Pengawasan Berkelanjutan***

Pengawasan yang berkelanjutan sangat penting untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa depan. Inspeksi rutin dan evaluasi dari BPK dapat membantu mendeteksi dan menanggulangi potensi kesalahan dalam laporan keuangan.

#### **4.9 Peran Pendidikan**

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat pemerintah setempat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang standar akuntansi dan pengelolaan keuangan. Program pelatihan yang rutin dapat membuat mereka lebih siap dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak diberikannya opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan oleh sejumlah faktor yang terkait dengan kelemahan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan pejabat pemerintah daerah dan auditor BPK, terungkap bahwa ada masalah signifikan terkait dengan pengelolaan aset daerah, ketidaktertiban administrasi, dan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang menyebabkan ketidakmampuan pihak pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, di mana proses pengelolaan keuangan daerah masih kurang optimal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan daerah turut menjadi penyebab utama ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi. Banyaknya staf yang kurang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku membuat proses audit menjadi lebih kompleks dan berpotensi menghasilkan opini disclaimer dari BPK. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di bidang akuntansi pemerintahan menyebabkan adanya kesalahan pengelolaan data keuangan yang berakibat pada ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi pengawasan internal, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan juga belum berjalan dengan baik. Meskipun ada lembaga yang bertugas untuk mengawasi proses keuangan daerah, tetapi mekanisme pengawasan yang ada tidak efektif dalam mendeteksi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada sebelum laporan keuangan diaudit oleh BPK. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu diperkuat agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem kontrol yang lebih baik, diharapkan kualitas laporan keuangan daerah dapat meningkat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perbaikan dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk menghindari terulangnya pemberian opini disclaimer oleh BPK. Pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan kualitas SDM, memperkuat sistem pengawasan internal, serta meningkatkan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya pelatihan rutin bagi pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, penguatan sistem informasi akuntansi daerah, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan BPK. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memperbaiki kualitas laporannya dan memperoleh opini yang lebih baik dari BPK di masa yang akan datang.

#### **5. Kesimpulan**

Pertama, laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023, sebagian besar temuan yang ditemukan BPK adalah permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap yang belum optimal. Permasalahan pengelolaan aset ini diantaranya yaitu kesalahan pencatatan, perhitungan, kelengkapan dan penghapusan. Pengaruh temuan-temuan atas Aset Tetap terhadap kualitas LKPD dan penilaian opini BPK. Kedua, Bentuk pertanggungjawaban atas penyelesaian tindak lanjut, pihak Kabupaten Kepulauan Meranti setiap tahunnya telah membentuk Tim TLHP yang ditetapkan melalui SK Bupati. Selama ini pihak Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya bisa menindaklanjuti semua rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BPK yaitu selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Ketiga, terdapat delapan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut di Kabupaten Kepulauan Meranti, diantaranya, yaitu: 1) Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Perubahan Struktur Organisasi (Mutasi); 3) Koordinasi yang belum maksimal; 4) Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI); 5) Belum adanya sanksi yang tegas; 6) Persepsi pemeriksa yang berbeda-beda; 7) Pihak ketiga yang kurang responsive; dan 8) Banyaknya aset limpahan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung. Keempat, upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

guna mengoptimalkan TLHP diantaranya, yaitu: 1) Melaksanakan semua rekomendasi yang diberikan BPK; 2) Memperbaiki tata kelola asset dan merapikan pencatatan asset yang dimiliki; 3) Mensensus Kembali barang milik daerah yang belum terinventarisasi dengan baik; 4) Menginventarisasi kembali temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti; 5) Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada BPK untuk membahas substansi.

### **Saran**

Saran untuk penelitian ini adalah agar pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti segera melakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan dengan memprioritaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif bagi pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang cukup mengenai standar akuntansi pemerintah dan prosedur penyusunan laporan yang sesuai. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengawasan internal dan sistem kontrol untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi opini BPK. Perbaikan ini akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperbesar kemungkinan mendapatkan opini yang lebih baik dari BPK di masa depan.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan topik ini dengan memperluas cakupan analisis ke daerah lain yang memiliki tantangan serupa dalam pengelolaan keuangan dan pemberian opini BPK. Peneliti di masa mendatang dapat melakukan perbandingan antara daerah yang berhasil memperoleh opini wajar dari BPK dan daerah yang masih menghadapi masalah serupa, untuk mencari faktor-faktor penghambat atau keberhasilan yang dapat diterapkan secara lebih luas. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat menggali lebih dalam tentang efektivitas kebijakan dan program perbaikan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah setelah penelitian ini dilakukan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap opini yang diberikan oleh BPK.

### **Limitasi dan studi lanjutan**

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan data yang terbatas pada satu daerah, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi di daerah lain yang memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini mengandalkan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, yang tentunya memiliki keterbatasan subjektivitas dari responden yang dapat memengaruhi objektivitas temuan. Meskipun peneliti telah berusaha untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, masih ada kemungkinan adanya bias atau informasi yang tidak terungkap dengan lengkap. Oleh karena itu, hasil penelitian ini harus dipandang sebagai gambaran dari situasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan tidak dapat digeneralisasikan sepenuhnya.

Untuk studi mendatang, disarankan agar penelitian lebih mendalam dilakukan dengan memperluas cakupan ke beberapa daerah lain yang juga menghadapi masalah serupa dalam penyusunan laporan keuangan dan mendapatkan opini disclaimer dari BPK. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini oleh BPK, serta untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah diterapkan setelah penelitian ini dilakukan, untuk melihat apakah ada perbaikan yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan dan apakah Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil memperoleh opini yang lebih baik dari BPK.

### **Ucapan terima kasih**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penelitian ini. Terutama kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang telah memberikan informasi dan wawasan yang berharga terkait dengan proses audit laporan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah meluangkan

waktu untuk wawancara dan memberikan data yang sangat membantu dalam penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan yang konstruktif sepanjang proses penelitian. Semoga bantuan dan kerjasama yang diberikan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan penelitian ini serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

## Referensi

- Al Falah, P., Sefti, N. A., Aprillia, A., Sihombing, S. B., Natalia, J., & Ryandana, M. . (2024). Analisis Dampak Pasca Pemekaran Kecamatan Serasan Timur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1), 42-50.
- Alifia, H. (2024). *Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Dan Strategi Pengembangan Berbasis Komoditas Unggulan Di Kabupaten Pesisir Barat Sebagai Kabupaten Tertinggal*. Universitas Lampung.
- Anasta, L., & Ambarwati, V. (2023). Menganalisis Program Kinerja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang : Studi Kabupaten dan Kota Serang 2017-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 3(1), 31-36. doi:10.35912/rambis.v3i1.2219
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anisman, H. B. (2021). Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pusat Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 1(2), 77-90. doi:10.35912/rambis.v1i2.408
- Bakce, D., Syahza, A., & Asmit, B. (2019). *Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antar-Negara di Provinsi Riau*. Paper presented at the Unri Conference Series: Agriculture and Food Security.
- BPK, R. (2019). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Fahrani, A. R., Lestari, A. S., Putri, N. R., Pasha, N. A., Indrawati, Y., & Halimah, S. N. (2024). Analisis Penyebab Internal dan Eksternal dalam Fraudulent Financial Reporting: Studi Tinjauan Literatur. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 4(2), 171-186. doi:10.35912/rambis.v4i2.3682
- Fahriyani, A., Sitasari, N., & Safitri, S. (2020). Hubungan Regulasi Emosi Dengan Self Efficacy Pada Guru SLB Negeri Pematang. *JCA of Psychology*, 1.
- Fitriana, A. N. R. A., Widarno, B., & Harimurti, F. (2019). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah (Studi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(4). doi:<https://doi.org/10.33061/jasti.v15i4.3750>
- Hardani, H., Sukmana, D. J., & Fardani, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Indonesia, R. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 3(1), 1-17. doi:10.35912/rambis.v3i1.2006
- Keuangan, B. P. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK RI* .
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi*. Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi ....
- Lubna, I., Arifin, M. A., & Nurmala, N. (2024). Analisis Audit Tenure, Ukuran Perusahaan, dan Audit Delay terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 4(1), 131-143. doi:10.35912/rambis.v4i1.3360
- Muzaki, K., Yuliani, F., & Farida, L. (2017). Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Kampung (ADK). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 215-255.
- Nandaska, T. (2020). *Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*. Universitas Islam Riau.



- Paemba, C. L., Todingbua, M. A., & Tandil, A. (2024). Analisis Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamasa. *Paulus Journal of Research*, 1(3).
- Pertiwi, R., Sujianto, S., & Mashur, D. (2024). Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 594-605.
- Putra, S. S., & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *ProBank*, 6(1), 120-128. doi:<https://doi.org/10.36587/probank.v6i1.879>
- Rahmawati, I., Rikumahu, B., & Dillak, V. J. (2017). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan Corporate social responsibility Terhadap kinerja keuangan perusahaan. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 2(2), 54-70. doi:<https://doi.org/10.29407/jae.v2i2.866>
- Rasudin, N. (2022). Kearifan Lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 147-164.
- Ratnasari, C., Yuliantoro, Y., & Fikri, A. (2021). Eksistensi Kelenteng Hoo Ann Kiong sebagai Objek Wisata Budaya di Kabupaten Meranti. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 393-398.
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 99-109. doi:<https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>
- Safriyal, S., Azlina, N., & Wahab, W. (2023). Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Penerapan SAP pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2275-2280.
- Sary, D. V., Rahman, K., Prayuda, R., & Sundari, R. (2021). Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Sosio Informa*, 7(2), 136-157.
- Sekenil, M., & Heluka, E. (2021). Analisis pengelolaan alokasi dana desa terhadap percepatan pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 93-109. doi:<https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.76>
- Sianturi, R. S., & Rinendy, J. (2023). Pengaruh Kualitas Audit (Ukuran Kap), Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Opini Audit Going Concern (Oagc) Pada Sektor Teknologi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 16-23. doi:<https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.713>
- Syahza, A., & Suarman, S. (2018). Model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 18(3), 365-386.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam pendekatan penelitian kualitatif. *Journal of scientific communication (jsc)*, 1(1). doi:<http://dx.doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 112-123. doi:<https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1007>